

BAB II

FENOMENA PEKERJA ANAK DI INDONESIA DAN GAMBARAN UNICEF

Pada bab ini memberikan tinjauan mendalam mengenai Anak-anak yang bekerja di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19 terjadi. Lebih lanjut, Bab ini juga menjelaskan tentang gambaran umum organisasi UNICEF, struktur, peran dan eksistensinya di Indonesia.

2.1 Gambaran Permasalahan Pekerja Anak di Indonesia

Bagian ini akan menguraikan secara rinci gambaran permasalahan pekerja anak di Indonesia, dengan fokus pada permasalahan yang dihadapi, dampak yang timbul, serta upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pekerja anak.

2.1.1 Permasalahan Pekerja Anak di Indonesia

Pekerja anak didefinisikan anak-anak yang bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan fisik, mental, intelektual, maupun moral mereka.⁴² Pekerjaan yang dilarang dan berbahaya dalam hal ini bukanlah pekerjaan yang mendukung perkembangan dan produktivitas anak,

⁴² ILO, "What Is Child Labour." 2020

seperti membantu orang tua di rumah. Pekerja anak menunjukkan bahwa hak asasi manusia masih dikurangi. Hal tersebut tidak seharusnya ada, meskipun hak anak atas kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan kebebasan adalah hak yang sudah seharusnya ada. Akan tetapi, banyak anak-anak masih terjebak pada pekerjaan yang mengganggu pertumbuhan mereka.

Fenomena pekerja anak ini banyak terkait dengan permasalahan ekonomi dan kemiskinan pada keluarga, namun kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi eksistensi pekerja anak.⁴³ Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi lainnya juga terkait dengan isu pekerja anak seperti rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan dini, ketidakmerataan pembangunan, ketidakstabilan pendapatan, bencana alam, diskriminasi sosial dan ekonomi hingga kurangnya akses terhadap informasi. Beberapa permasalahan yang menjadi faktor munculnya pekerja anak ini adalah

1. Faktor ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak yang bekerja berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah-bawah. Permasalahan ekonomi internal pada keluarga memberikan lebih banyak dorongan pada anak untuk ikut serta mencari penghasilan. Mengambil contoh di salah satu provinsi dengan tingkat ekonomi terendah yaitu NTT, banyak anak-anak di NTT khususnya di kota Kupang yang berkeliaran menjadi anak jalanan. Berdasarkan pemantauan pemerintah setempat, anak-anak

⁴³ Chae young Kim, "Is Combining Child Labour and School Education the Right Approach? Investigating the Cambodian Case," *International Journal of Educational Development* 29, no. 1 (2009).

tersebut masih memiliki keluarga namun berpenghasilan minim sehingga untuk memenuhi keinginan pribadi maupun keluarga anak-anak ini bekerja dengan turun ke jalanan.

2. Faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan dan pemahaman orang tua terhadap kehidupan jangka panjang menjadi salah satu faktor anak-anak bekerja. Beberapa orang tua akhirnya membiarkan anaknya menjadi pekerja anak karena masih berdiri pada beberapa stigma seperti wanita tidak perlu sekolah tinggi, sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran, dan bekerja sedini mungkin untuk persiapan menghadapi hidup. Stigma tersebut pada akhirnya akan membatasi kesempatan anak-anak untuk sekolah dan mengejar pendidikan.

3. Faktor sosial. Keadaan lingkungan dan norma sosial dapat mempengaruhi persepsi terhadap pekerja anak. Jika masyarakat menganggap wajar anak-anak kerja dengan alasan apapun, hal tersebut dapat memperkuat adanya praktik pekerja anak. Sebagai contoh permasalahan pekerja anak di Industri Kelapa Sawit yang sudah dijadikan sebagai hal yang lumrah untuk anak-anak bekerja di tempat tersebut. Meskipun sebagian besar dari mereka menganggap bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan sukarela namun hal ini tergolong dalam perampasan hak asasi anak. Anak-anak ditugaskan untuk memangkas pohon dan memanen tandan sawit yang cukup besar. Hal tersebut sangat berbahaya dan mempengaruhi tumbuh kembang maupun kesehatan anak-anak.

4. Faktor budaya. Beberapa budaya keluarga memiliki norma dan tradisi yang kuat untuk mendorong partisipasi anak dalam pekerjaan. Diantaranya bisa karena tradisi pekerjaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga anak dituntut untuk lebih cepat masuk dalam pekerjaan yang sama dengan orang tuanya. Di Indonesia sendiri, sektor pertanian menyumbang pekerja anak yang cukup besar meliputi pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sebagian besar diantaranya bekerja di dalam lingkungan keluarga atau mengerjakan pekerjaan yang dilakukan turun menurun oleh orang tuanya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak bekerja di lingkungan tersebut karena budaya keluarga yang mendorong anak-anak meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya.

Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu adanya pekerja anak yang kemudian menjadi fenomena yang meresahkan dan masalah yang serius di Indonesia. Fenomena pekerja anak sempat mendapatkan perhatian lebih saat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada tahun 1998, krisis ekonomi berada pada puncaknya yang menyebabkan rumah tangga mengalami penurunan pendapatan dan harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.⁴⁴ Terdapat kekhawatiran mengenai orang tua yang terpaksa mengirim anaknya untuk bekerja demi membantu pendapatan keluarga. Meskipun pada kenyataannya tidak terjadi kenaikan pekerja anak yang signifikan, namun krisis ekonomi pada tahun tersebut

⁴⁴ Agus Priyambada, Asep Suryahadi, and Sudarno Sumarto, "Apa Yang Terjadi Dengan Pekerja Anak Di Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi : Pertukaran Antara Sekolah Dan Bekerja," *SMERU Working Paper* (2005).

memblokir tren penurunan angka pekerja anak di tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini terulang pada tahun 2020, tren penurunan pekerja anak yang terjadi di tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang drastis pada tahun tersebut. Hal itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kerugian dan mengakibatkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan.

Kurangnya pendidikan bagi anak-anak yang bekerja saat ini mengindikasikan akan terjadinya kemiskinan di masa depan. Anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk bekerja memiliki sedikit kesempatan atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Seperti Billy, seorang anak di Jakarta yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah karena harus bekerja menjadi pemulung sampah.

Gambar 2. 1 Billy Pekerja Anak



Sumber : Youtube CNN Indonesia

Anak-anak yang tumbuh sebagai orang dewasa dengan pendidikan rendah dan tingkat keterampilan rendah akan tetap bekerja dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah dan upah yang rendah pula. Fenomena pekerja anak ini berpotensi melanggengkan kemiskinan.⁴⁵ Anak-anak yang terpaksa bekerja karena kemiskinan ini memiliki sedikit peluang untuk keluar dari kemiskinan saat dewasa, kemudian besar kemungkinan anak-anak mereka juga meneruskan pola ini.

2.1.2 Dampak Adanya Pekerja Anak di Indonesia

Kehadiran anak-anak yang bekerja di Indonesia dapat berdampak negatif pada lingkungan, bangsa, dan mereka sendiri. Dampak yang dirasakan pekerja anak bisa berbeda tergantung oleh sektor kerja dan lingkungannya. Secara umum dampak yang dapat dirasakan oleh pekerja anak adalah kehilangan waktu untuk bermain, gangguan tumbuh kembang fisik dan mental, rentan terhadap kecelakaan

⁴⁵ ILO, *A Future Without Child Labor* (Geneva, 2002).

kerja dan bahaya lain yang menyertai.⁴⁶ Ditambah resiko lain yang menyertai seperti perdagangan anak, pemaksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan menjadi gambaran nyata yang bisa dialami anak didasarkan pada ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai resikonya. Pada dasarnya pekerja anak merupakan tindakan eksploitasi yang dapat membahayakan dan merugikan anak-anak.

Selain resiko dan dampak diatas, dampak tertentu yang dirasakan pekerja anak, antara lain :⁴⁷

1. Dampaknya bagi perkembangan fisik anak

Anak-anak memiliki tubuh yang sangat rentan karena masih dalam fase perkembangan. Aktifitas yang dilakukan anak-anak yang bekerja akan berbeda dengan aktifitas anak pada umumnya. Anak akan dituntut lebih siap secara fisik dalam pekerjaannya sehingga hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka. Ditambah resiko lain yang bisa terjadi akibat aktifitas kerja seperti kecelakaan kerja dan penyakit.

2. Dampaknya bagi perkembangan emosi anak

Tuntutan kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan mental anak-anak. Beban dan tanggung jawab di usia yang belum cukup dapat menyebabkan ketegangan emosional, seperti mudah stress dan cemas, depresi, merasa terisolasi dari teman sebaya, gangguan mental jangka panjang, dan perubahan perilaku seketika.

⁴⁶ Dewi Sulastri, "Faktor-Faktor Yang Disebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Di Kelian Dalam Desa Tambang Emas Tradisional Di Tering Kabupaten," *eJournal Sociatri- Sosiologi* 4 (2016): 254.

⁴⁷ Faridah and Afiyani, "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia."

3. Dampaknya bagi perkembangan sosial anak

Anak-anak yang bekerja akan banyak terpengaruhi oleh orang dewasa disekitarnya. Mereka kehilangan masa kecil dan kesempatan tumbuh kembang sesuai usianya. Interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat akan semakin minimalisir sehingga membentuk dirinya yang sulit bijaksana saat berinteraksi dengan orang lain.

4. Dampaknya bagi lingkungan dan keberlanjutan

Anak-anak harus diberikan arahan, bimbingan, dan kesempatan yang luas untuk berkembang sesuai dengan fasenya karena mereka akan menjadi generasi penerus di masa depan. Anak-anak yang sejak dini sudah dididik dan dibebaskan atas haknya akan lebih siap untuk memimpin generasinya dan memberikan hak kepada penerusnya di masa depan.

2.1.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Pekerja Anak

★ Semua anak di Indonesia memiliki hak untuk tumbuh dan mengembangkan diri, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menjamin hak-hak anak, termasuk Hak untuk eksistensi, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Selanjutnya, UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan ketentuan yang melarang anak-anak di bawah usia tertentu untuk bekerja. Untuk menghindari

eksploitasi, pasal ini menjelaskan jenis pekerjaan dan batasan jam kerja untuk melindungi pekerja anak.

Pemerintah Indonesia telah berusaha secara bertahap untuk mengatasi masalah pekerja anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia telah mengembangkan berbagai rencana untuk menghapuskan pekerja anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah pekerja anak secara konsisten.

Strategi yang dilakukan pemerintah tersebut diantaranya adalah :

1. Landasan hukum

Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disahkan, pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan masalah anak. Undang-undang tersebut menjamin hak asasi yang harus dimiliki anak-anak.⁴⁸ Kemudian pada tahun 1990, pemerintah Indonesia mematuhi atau mengesahkan Konvensi Hak Anak, yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1989. Perhatian pemerintah terhadap masalah pekerja anak di Indonesia dimulai dengan tindakan pemerintah ini.

Tiga tahun setelah ratifikasi, Konferensi Pekerja Anak pertama diadakan di Indonesia. Hasil dari konferensi tersebut adalah sebuah deklarasi yang menunjukkan bahwa para peserta konferensi berkomitmen

⁴⁸ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, 1979.

untuk mengakhiri keterlibatan anak dalam pekerjaan. Deklarasi ini menekankan bahwa penghapusan pekerja anak memerlukan upaya hukum, pendidikan dan penelitian yang lebih baik. Deklarasi dan program yang telah dicapai dievaluasi pada Konferensi Pekerja Anak kedua tahun 1996.

Salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki kesetaraan pendidikan dan mencegah anak bekerja adalah mengesahkan peraturan wajib belajar tahun 1997. Selain itu, pemerintah mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan penghapusan pekerjaan terburuk anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.⁴⁹ Selanjutnya, Keputusan Presiden RI nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Anak terburuk (RAN-PBPTA) dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pekerja anak lebih lanjut. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berfokus pada masalah pekerja anak dengan menghapus jenis pekerjaan anak yang paling buruk dan menetapkan batas usia 18 tahun atau di bawahnya.

Hukuman atau sanksi bagi pelaku yang melanggar peraturan pemerintah terhadap hak asasi anak termasuk eksploitasi diatur dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 memberikan

⁴⁹ Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002*, 2002.

perlindungan khusus untuk anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual.

2. Program yang ditujukan khusus untuk pekerja anak

Problem pekerja anak memerlukan penanganan komprehensif dan konsisten. Karena itu, untuk mengatasi masalah pekerja anak ini, peraturan tertulis bukan satu-satunya cara. Program dan agenda kerja juga digunakan. Pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional untuk Menghapus Pekerjaan Terburuk Anak (KAN-PBPTA) setelah meratifikasi Konvensi ILO No.138 dan 182.⁵⁰ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 menetapkan pembentukan komite tersebut. (1) membuat Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN-PBPTA), (2) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya, dan (3) memberikan laporan pelaksanaan RAN-PBPTA kepada pemerintah atau pihak berwenang yang sesuai untuk mendapatkan penanggulangan yang sesuai. Upaya pembentukan komite tersebut dikembangkan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pencegahan di lembaga pendidikan, memberikan layanan pendidikan formal dan keterampilan, rehabilitasi pada anak-anak yang sudah terpapar hingga sosialisasi atau memberikan pemahaman tersirat pada masyarakat melalui platform brosur, poster, dan paket informasi.

⁵⁰ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional*, 2002.

Selama kurun waktu 10 tahun (2002-2012), program yang dilakukan pemerintah dengan bantuan berbagai pihak berhasil mengurangi pekerja anak. 9658 anak ditarik dari pekerjaan dan 57.453 dicegah bekerja.. Angka tersebut menjadi capaian yang baik untuk penghapusan pekerja anak di Indonesia sehingga peran komite dan berbagai program RAN-PBPTA terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Untuk mendukung pelaksanaan RAN-PBPTA, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peta Jalan menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak.⁵¹

Panduan strategis RAN-PBPTA untuk mempercepat penghapusan pekerja anak di Indonesia, serta masalah utama dari pengalaman aksi selama sepuluh tahun pertama, dibahas dalam Peta Jalan menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Peta jalan ini memungkinkan semua pihak, termasuk pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, kementerian dan lembaga terkait, dan berbagai organisasi masyarakat, untuk mendapatkan arahan dan petunjuk tentang cara mengatasi masalah pekerja anak secara menyeluruh, berskala besar, dan berkelanjutan.⁵²

Selain itu, pemerintah menjalankan berbagai program yang tidak menyentuh pekerja anak secara langsung, tetapi dapat menyebabkan

⁵¹ Peta Jalan Menuju (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, 2014.

⁵² Ibid.

pengurangan pekerja anak. Program-program ini termasuk pendidikan non formal untuk anak-anak yang berhenti sekolah, bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat, bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), program pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan banyak lagi. Beberapa program dianggap mempengaruhi keberadaan pekerja anak.

2.1.4 Pekerja Anak di Indonesia selama Pandemi Covid-19

Tahun 2020 menjadi tahun dimana pandemi Covid-19 secara resmi diumumkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO). Pandemi ini membawa dampak pada stabilitas seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada maret 2020, kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden secara langsung kepada publik. Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers dan saluran komunikasi pemerintah mengumumkan langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Beberapa langkah tersebut yaitu pemerintah melakukan penanganan dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan Covid-19. Presiden menyerukan untuk melakukan pembatasan sosial termasuk kebijakan kerja, belajar dan ibadah dari rumah.⁵³ Vaksinasi mulai dilakukan pada awal tahun 2021 yang merupakan prioritas utama pemerintah untuk mencapai kekebalan masyarakat. Hingga kemudian di akhir tahun 2021, upaya vaksinasi yang diikuti dengan pengetahuan yang lebih matang mengenai virus ini menunjukkan

⁵³ Vincentius Gitiyarko, "Upaya Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19," *Kompaspedia*, last modified 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.

hasil, kasus harian Covid-19 di Indonesia menurun secara signifikan menjadi tanda bahwa penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi tanda penetapan berakhirnya status gawat darurat Pandemi Covid-19 di Indonesia.⁵⁴

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia ini membawa efek berkelanjutan pada sektor ekonomi, banyak sektor usaha yang terpaksa menghentikan operasinya atau mengurangi aktivitas secara drastis. Penutupan bisnis, pemutusan hubungan kerja, hingga ketidakmampuan pekerjaan untuk bertahan di masa krisis ini menyebabkan banyak keluarga mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ekonomi yang memburuk ini memaksa banyak keluarga mencari cara tambahan untuk bertahan hidup, salah satunya dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan anak yang lebih banyak di rumah karena pemberhentian aktivitas belajar di sekolah semakin mendukung maraknya pekerja anak. Bahkan orang tua menganggap, selama pandemi selain di rumah anak-anak sebaiknya membantu mencari tambahan penghasilan.⁵⁵ Pekerja anak di tahun terjadinya pandemi ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Banyak anak yang menjadi pekerja anak karena ekonomi keluarganya atau anak-anak

⁵⁴ Indonesia, *Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*.

⁵⁵ Dewi Pancawati, "Pekerja Anak Dalam Impitan Ekonomi Dan Pandemi," *Kompaspedia*, last modified 2021, <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/02/pekerja-anak-dalam-impitan-ekonomi-dan-pandemi>.

kehilangan orang tuanya akibat Covid-19 yang memicu anak mencari uang sendiri untuk kehidupan sehari-hari.

Jumlah populasi Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 270 juta, dengan 29,50% atau 79,71 juta di antaranya adalah anak-anak yang berumur 0-17 tahun.⁵⁶ Menurut data yang dirilis pada agustus 2020 oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 3,36 juta anak-anak di Indonesia bekerja, dan 1,17 juta di antaranya adalah anak-anak yang bekerja. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 320 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Jumlah yang banyak untuk menghitung hilangnya hak pada anak-anak.

Tabel 3 Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen)

Provinsi	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Aceh	1.01	1.39	1.98	1.18	1.68
Sumatera Utara	4.02	4.83	6.39	4.01	4.29
Sumatera Barat	2.48	2.64	4.29	2.46	2.51
Riau	2.04	2.87	3.37	2.21	1.92
Jambi	1.57	1.86	2.43	2.06	2.88
Sumatera Selatan	2.72	2.76	3.41	2.27	2.32
Bengkulu	1.79	1.94	2.98	1.99	2.56
Lampung	2.48	3.56	4.01	2.20	2.55
Kep. Bangka Belitung	2.97	3.30	4.81	2.41	4.26
Kep. Riau	1.87	0.97	1.19	0.98	1.09
Dki Jakarta	0.61	0.82	1.30	1.17	1.48
Jawa Barat	1.82	1.60	1.91	1.85	2.35
Jawa Tengah	2.41	2.26	2.31	2.17	1.98
Di Yogyakarta	1.69	2.06	1.91	2.08	1.73
Jawa Timur	1.51	2.01	2.59	1.64	1.95
Banten	1.90	1.07	2.02	1.31	2.01
Bali	4.04	3.70	4.31	3.02	3.96
Nusa Tenggara Barat	4.00	4.74	6.55	4.08	3.94

⁵⁶ BPS RI, *No Title*, 2020.

Nusa Tenggara Timur	5.12	4.49	5.67	3.42	4.42
Kalimantan Barat	3.19	3.50	4.01	2.55	2.86
Kalimantan Tengah	2.31	3.52	4.81	3.06	3.32
Kalimantan Selatan	2.06	2.95	3.11	2.31	2.89
Kalimantan Timur	1.79	2.20	3.11	1.43	2.04
Kalimantan Utara	4.15	5.66	4.84	2.66	2.11
Sulawesi Utara	1.72	2.98	3.15	2.45	1.61
Sulawesi Tengah	3.96	5.12	5.59	4.04	4.67
Sulawesi Selatan	4.32	5.33	6.16	4.90	4.63
Sulawesi Tenggara	4.11	6.46	8.05	5.26	5.32
Gorontalo	6.78	4.28	5.46	4.57	4.56
Sulawesi Barat	6.31	5.50	5.28	3.46	3.70
Maluku	2.87	2.49	3.35	3.04	2.14
Maluku Utara	2.45	2.12	3.80	3.51	2.42
Papua Barat	2.82	3.81	5.35	2.30	2.19
Papua	4.50	3.25	3.49	3.17	4.20
Indonesia	2.44	2.63	3.25	2.35	2.61

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Pada 2019, proporsi pekerja anak adalah 2.35%, atau kurang lebih 1,33 juta anak. Namun, pada tahun 2020, proporsi ini meningkat menjadi 3.25%, atau 1,89 juta anak. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pada periode Covid-19 angka pekerja anak mengalami peningkatan yang cukup drastis. Peningkatan ini melampaui tren penurunan pekerja anak di tahun-tahun sebelumnya dan merupakan peningkatan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam data yang sama juga menunjukkan kenaikan angka pekerja anak hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi dengan jumlah pekerja anak paling banyak di temukan pada masa pandemi covid-19 adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan presentase mencapai 8.05%. Kemudian diikuti dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan presentase 6.55%. Sementara provinsi yang mengalami peningkatan angka pekerja anak terbesar pada masa pandemi Covid-19 adalah Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2019 presentase

pekerja anak di Provinsi tersebut sebesar 2.30% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 3.05% menjadi 5.35%. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang signifikan untuk menghitung hilangnya hak anak.

Anak-anak yang bekerja berada di berbagai bidang pekerjaan. Di Indonesia, pekerja anak dapat ditemukan di berbagai sektor seperti pertanian, jasa layanan rumah tangga, layanan tempat makan, perkebunan, pertanian, hingga anak-anak yang mencari usaha di jalanan. Salah satu contoh nyata adalah Ilham Afrizal seorang anak berusia 12 tahun yang menjadi pekerja seni badut di Medan, Sumatera Utara dan 40 anak jalanan lainnya yang ditemukan di Kota Bogor dengan enam di antaranya masih berusia di bawah 13 tahun.⁵⁷ Pekerja anak di Indonesia lebih banyak berada pada sektor pekerjaan informal seperti pertanian, industri dan jasa. Berikut distribusi pekerja anak menurut lapangan usaha di Indonesia:

Tabel 4 Distribusi Pekerja Anak menurut Lapangan Usaha 2019-2021

Sektor Pekerjaan	2019	2020	2021
Pertanian	28.33	30.93	27.63
Industri	22.69	15.12	14.86
Jasa	48.98	53.96	57.51

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sektor jasa adalah yang paling banyak mempekerjakan anak, dengan persentasenya meningkat sebesar 48.98% pada 2019, 53.96% pada 2020, dan 57.51% pada 2021. Sektor jasa mencakup jasa usaha, jasa informasi dan komunikasi, dan jasa sosial. Anak-anak yang bekerja di sektor ini lebih banyak berada di perkotaan. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar

⁵⁷ Pancawati, "Pekerja Anak Dalam Impitan Ekonomi Dan Pandemi."

28.33% di tahun 2019, 30.93% di tahun 2020 dan 27.63% di tahun 2021. Sektor ini mencakup pertanian ladang, kehutanan dan perikanan. Dan yang terakhir adalah pada sektor industri dengan angka 22.69% di tahun 2019, 15.12% di tahun 2020 dan 14.86% di tahun 2021. Masing-masing sektor mengalami peningkatan pada tahun 2020 menyoroti perlunya tindakan segera dan efektif dari pemerintah maupun aktor lain untuk memperkuat perlindungan sosial, memastikan akses pendidikan yang berkelanjutan dan mengatasi akar penyebab pekerja anak.

2.2 Gambaran Umum UNICEF

2.2.1 Bentuk Organisasi UNICEF

United Nations International Children Emergency Fund's (UNICEF) adalah organisasi internasional yang melindungi dan memerhatikan anak. Organisasi Internasional didirikan pada tahun 1946 di New York, Amerika Serikat, sebagai tanggapan atas kekhawatiran dunia tentang kondisi anak-anak di Eropa pasca Perang Dunia II.⁵⁸ Meskipun UNICEF didirikan oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB, namun peran UNICEF dapat bergerak bebas dan tidak terikat pada negara-negara yang menjadi anggotanya.⁵⁹

Perang Dunia II telah merusak kondisi anak-anak dengan krisis makanan dan kesehatan. UNICEF terus memberikan bantuan kepada anak-anak di seluruh negara

⁵⁸ CATHARINA IDA AYU PUTRI RENYUT, "PERAN UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND) DALAM MELINDUNGI ANAK-ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK SEPARATIS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA)," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–10.

⁵⁹ Luerdi, "Peran Organisasi Internasional Di Wilayah Perang: Upaya UNICEF Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Yaman," *Dauliyah* 6, no. 1 (2021): 23–54.

setelah krisis tersebut, dan sepanjang tahun 1970-an, UNICEF berkembang menjadi pendukung kuat hak-hak anak.⁶⁰ UNICEF membantu Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia membuat Konvensi Hak Anak setelah sepuluh tahun. UNICEF telah memastikan bahwa Konvensi Hak Anak adalah perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diadopsi pada tahun 1989, dan UNICEF telah memastikan bahwa itu diterapkan dengan benar.⁶¹

Pada tahun 1990-an, UNICEF mulai menjalankan pengelompokan Negara-negara sesuai dengan indikator kinerja sosial yang dapat membantu UNICEF dalam menjalankan komitmen perlindungan hak-hak anak. Pada tahun 1993 UNICEF menerbitkan publikasi pertamanya dengan judul "*The Progress of Nations*" yang merangkum program di setiap Negara guna untuk melancarkan program penegakan Hak Asasi Manusia yang dibentuk UNICEF.⁶² Sekitar 3.5 juta nyawa anak-anak telah diselamatkan setiap tahun oleh imunisasi massal dan pengendalian diare. Hal tersebut telah menjadi sebuah tanda kemajuan kesejahteraan hidup anak-anak.

UNICEF telah hadir membawa harapan revolusi keberlangsungan hidup anak sebagai sebuah perkembangan dalam bentuk teori maupun tindakan yang lebih nyata. UNICEF menjadi sebuah institusi yang lebih aktif dalam berkontribusi perannya daripada sebelumnya. Yang menjadi tujuan utama UNICEF saat ini adalah fokus dalam melaksanakan strategi untuk kesejahteraan anak-anak,

⁶⁰ UNICEF, "UNICEF History | UNICEF."

⁶¹ History.com, "Unicef-Founded," n.d.

⁶² Made Melia Dwiyani, Ni Rainy Priadarsini, and A. Prameswari, "Peran Unicef Dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Nigeria," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 03 (2015): 15.

mendorong Negara-negara untuk meratifikasi konvensi anak-anak, serta menguraikan doktrin *Child First* bagi setiap anak di dunia.⁶³

Visi dan Misi UNICEF, yang dimandatkan secara langsung oleh Majelis Umum PBB, UNICEF menjaga hak-hak anak dan mendukung kebutuhan dasar mereka, memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mencapai potensi maksimal mereka. Berdasarkan Perjanjian Hak Anak, UNICEF memiliki dasar moral dan standar perilaku yang kuat untuk melindungi anak-anak di seluruh dunia. UNICEF menganggap kebutuhan universal untuk kelangsungan hidup, perlindungan, dan perkembangan anak sebagai komponen penting dari kemajuan manusia. Dengan mengumpulkan sumber daya material dan politik, UNICEF membantu negara-negara, terutama yang berkembang, untuk memastikan prioritas anak-anak dalam kebijakan dan layanan. Dalam situasi darurat, UNICEF bekerja sama dengan kolaborator PBB dan institusi kemanusiaan untuk memberikan respons cepat, menjaga hak-hak anak, dan membantu mereka yang merawat anak-anak. UNICEF memprioritaskan anak-anak di negara-negara termiskin, bersifat non-partisan, dan bebas diskriminasi. Selain itu, UNICEF mendukung hak-hak perempuan dan anak perempuan serta partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi, politik, dan sosial. Dengan bekerja sama dengan mitra global, UNICEF berkomitmen mencapai tujuan pembangunan manusia berkelanjutan sesuai dengan Piagam PBB tentang perdamaian dan kemajuan sosial.⁶⁴

⁶³ Ibid.

⁶⁴ UNICEF, "UNICEF Mission Statement," <https://www.unicef.org/>.

Sidang umum PBB menandatangani Konvensi Hak Anak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Konvensi tersebut mencantumkan hak setiap anak, seperti hak untuk hidup dan hak untuk berkembang, hak untuk pendidikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan pelecehan, dan hak untuk dilindungi dari pekerjaan berbahaya dan eksploitasi.

Oleh karena itu, UNICEF adalah salah satu lembaga PBB yang ditugaskan untuk memantau dan memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Berdasarkan Konvensi Anak, UNICEF juga mengadakan KTT Dunia untuk Anak-anak pada september 1990. UNICEF menyelenggarakan KTT, yang berhasil mengumpulkan 71 kepala negara untuk mengadopsi deklarasi tentang kelangsungan hidup, perlindungan, dan pertumbuhan anak bersama dengan strategi untuk menerapkannya pada tahun 1990-an. Hal ini juga membantu UNICEF membuat *The Progress of Nations*, yang mencatat seberapa jauh setiap negara telah memenuhi janji mereka terhadap anak-anak.⁶⁵

UNICEF telah melakukan program di hampir 200 negara dan lokasi di seluruh dunia dengan tujuan utama melindungi hak-hak anak serta keluarga mereka. Organisasi ini memiliki setidaknya 17 subdivisi fungsional, termasuk Bagian Pengembangan Anak Usia Dini, Kantor Gender dan Pembangunan, serta Kantor Program Perlindungan Anak.⁶⁶

⁶⁵ Noorani Shehzad, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak | UNICEF Indonesia," *UNICEF Indonesia*.

⁶⁶ ORG Chart, "Unicef Org Chart: How Does the United Nations Children's Fund Work," n.d.

Secara umum Program UNICEF didukung oleh kontribusi sukarela dari pemerintah, organisasi antar pemerintah, yayasan, sektor swasta, dan individu. Beragam sumber pendanaan ini memungkinkan UNICEF dapat memenuhi misi organisasi untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak-haknya, khususnya bagi kelompok yang paling rentan. Dengan SDGs untuk anak-anak yang menjadi inti pekerjaan inti UNICEF, rencana strategis UNICEF juga berfokus pada peningkatan koherensi kemitraan serta penyampaian dan evaluasi hasilnya. UNICEF menjalin hubungan erat dengan berbagai mitra untuk mengembangkan pengaturan pendanaan yang efisien, memaksimalkan dampak dari setiap dolar yang dibelanjakan untuk mendukung anak-anak di seluruh dunia.⁶⁷

Untuk membantu anak-anak memenuhi potensi mereka, UNICEF bekerja sama dengan PBB lainnya. Bersama-sama, kami mengoordinasikan program dan mengintegrasikan operasi untuk secara kolektif mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Pengaturan antar-organisasi PBB yang melaluinya UNICEF melaksanakan program-programnya meliputi⁶⁸:

- **Joint Programmes:** Program Bersama, yang didasarkan pada UNSDCF, menargetkan penyampaian bidang tematik tertentu dengan partisipasi dua hingga tiga badan PBB yang dipandu oleh teori perubahan, rencana kerja, dan anggaran yang sama.
- **Pooled Funds:** Dana Gabungan, yang dibentuk baik di tingkat negara atau global, berasal dari kontribusi berbagai donor yang digabungkan, dialokasikan

⁶⁷ UNICEF, “UNICEF Mission Statement.”

⁶⁸ Ibid.

atau dialokasikan secara ringan untuk membiayai intervensi bersama PBB. Hal ini mencakup Dana Gabungan Tematik khusus lembaga, Dana Perwalian Multi-Mitra (MPTF), Dana Darurat Tanggap Pusat (CERF), dan Dana Gabungan Berbasis Negara (CBPF).

- **UN-to-UN transfers:** Transfer PBB-ke-PBB lebih bersifat transaksional, sehingga memfasilitasi penggunaan keahlian badan-badan PBB lainnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan antar-organisasi merupakan sumber aliran pendanaan terbesar ketiga bagi UNICEF, selain dari pemerintah tradisional.⁶⁹

2.2.2 Peran UNICEF Secara Umum

UNICEF bertanggung jawab terhadap melindungi dan memajukan hak-hak anak di seluruh dunia. Hak anak mencakup Pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus memenuhi kebutuhan dasar anak secara keseluruhan.⁷⁰ UNICEF berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar anak, memenuhi kebutuhan dan memberikan dukungan terhadap potensi yang dimiliki anak-anak. Anak-anak dan keluarga yang terkena dampak konflik, bencana alam, krisis kemanusiaan, dan keadaan darurat lainnya dibantu oleh UNICEF. Sebagai organisasi Internasional, UNICEF melakukan advokasi, penelitian dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan, LSM, organisasi non-pemerintah dan mitra Internasional lainnya.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ “Konvensi Hak Anak Pasal 6,” n.d.

UNICEF menjadi pemimpin dalam membantu keluarga dan anak-anak yang terpapar virus Zika pada tahun 2016. Nyamuk Aedes, yang sebagian besar menggigit di siang hari, adalah sumber virus ini. Wabah virus ini muncul di Amerika dan menjadi epidemi besar di Brazil. WHO menjelaskan bahwa ibu hamil yang terinfeksi virus ini berpotensi melahirkan bayi dengan mikrosefali dan kelainan lainnya.⁷¹ Mikrosefali di dalam rahim dapat mengganggu perkembangan fisik dan intelektual bayi. Dalam mengatasi hal tersebut, UNICEF memberikan edukasi mengenai pencegahan dan perlindungan diri dari penularan virus Zika kepada masyarakat. Di samping itu, UNICEF bekerja sama dengan WHO dan PAHO untuk mengoptimalkan diagnosis, identifikasi, dan penciptaan vaksin agar penularan virus Zika pada ibu hamil dan anak-anak dapat dikurangi.⁷²

Generation Unlimited adalah kemitraan global yang diprakarsai oleh UNICEF pada tahun 2018. Kemitraan ini di resmikan di Majelis Umum PBB dan menjadi agenda trend-setter pada tahun tersebut dengan mempertemukan berbagai aktor seperti pembuat kebijakan, CEO, hingga generasi muda. Tujuan dibentuknya kemitraan ini adalah untuk menyebarluaskan pendidikan, pelatihan kejuruan dan peluang kerja bagi generasi muda. (sementara segini dulu)

UNICEF membantu anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana Cyclone Idai atau Topan Idai pada 2019. Bencana ini terjadi di Mozambik,

⁷¹ World Health Organization, *Zika Virus*, 2016.

⁷² UNICEF, "Zika Virus (ZIKV) Diagnostics" (n.d.).

Malawi, dan Zimbabwe, dan menyebabkan lebih dari 1,5 juta anak kehilangan rumah, sekolah, pusat kesehatan, dan kebutuhan makanan mereka. UNICEF memberikan bantuan berupa persediaan air bersih dan sanitasi, vaksinasi dan pemeriksaan malnutrisi, hingga dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak.⁷³

UNICEF kembali memberikan respon tanggap saat pandemi Covid-19 menyebar di seluruh dunia. Pada tahun 2020 tersebut, UNICEF menjadi bagian dari rencana distribusi vaksin global. UNICEF melakukan upaya pengadaan dan pasokan COVID-19. Agenda ini bertujuan untuk semua negara memiliki akses yang adil dan merata terhadap vaksin tersebut.⁷⁴

2.2.3 Eksistensi UNICEF di Indonesia

Pada tahun 1948, UNICEF tiba di Indonesia untuk pertama kalinya ketika Lombok, Nusa Tenggara Barat, terkena kekeringan, dan mereka memberikan bantuan cepat untuk mencegah kelaparan. Setahun kemudian, UNICEF secara resmi berkolaborasi dengan Republik Indonesia terkait dengan membangun dapur susu di Yogyakarta, yang saat itu merupakan pusat pemerintahan baru.

Fokus UNICEF adalah meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia. Salah satunya adalah pada tahun 1962, UNICEF mengadakan program nutrisi untuk 100 desa di delapan provinsi Indonesia saat itu. Program-program ini

⁷³ UNICEF, "Becoming the Leading Voice : 2006-2020" (n.d.).

⁷⁴ Ibid.

menunjukkan bahwa UNICEF melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab.

Pemerintah Indonesia mengumumkan Rencana Pembangunan Lima Tahun pertamanya pada tahun 1969, sepuluh tahun setelah perjanjian kerja sama resmi. Program yang berfokus pada hak-hak anak dan perlindungan anak adalah fokus rencana ini. Selain itu, UNICEF dan lembaga PBB lainnya berpartisipasi dalam proyek ini untuk memberikan bantuan teknis.

Kontribusi UNICEF di Indonesia kini lebih luas, baik dari jangkauan maupun program yang dilaksanakan. UNICEF berkomitmen untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak. sesuai dengan tugas utama UNICEF, memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak tertinggal.

2.2.3.1 UNICEF berkontribusi pada pendidikan anak di Indonesia

UNICEF membantu kesejahteraan anak di Indonesia melalui peran pemerintah dan mitra di daerah, provinsi, dan tingkat nasional. UNICEF memastikan bahwa undang-undang, kebijakan, dan layanan di Indonesia dapat memenuhi hak setiap anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Namun pada kenyataannya, apa yang terjadi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pendidikan anak di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pendidikan lanjutan tidak dapat diakses oleh 2,5 juta anak Indonesia, terdiri dari 600 ribu siswa sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta siswa SMP. Selain itu, Menurut data statistik BPS, anak-anak tertentu yang paling

rentan di tingkat provinsi dan kabupaten. Anak-anak ini sebagian besar berasal dari keluarga yang tidak beruntung dengan ekonomi yang rendah, yang menghalangi mereka untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya.⁷⁵

Hal ini juga selaras dengan tingkat pendidikan yang rendah di Papua, wilayah Indonesia bagian timur. Di antara semua provinsi Indonesia Papua, termasuk Kabupaten Mimika, memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah. pada tahun 2016. Informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia, provinsi ini adalah satu-satunya yang memiliki IPM rendah, dengan nilai 58,05, menjadikannya satu-satunya provinsi yang memenuhi kriteria ini. IPM rendah didefinisikan sebagai nilai jika provinsi tersebut memiliki nilai di bawah angka 60. Dengan IPM yang rendah ini, sumber daya manusia Papua menghadapi banyak masalah, termasuk pendidikan yang buruk, tingginya tingkat buta huruf, tingkat partisipasi yang rendah, kondisi medis yang tidak memadai, dan tingginya tingkat kemiskinan.⁷⁶

Dalam hal ini, UNICEF membantu meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat internasional. UNICEF telah mendapatkan dana internasional untuk membantu perbaikan pendidikan untuk membantu pemerintah Kabupaten Mimika. Melalui programnya, UNICEF terus meningkatkan prosedurnya untuk mempersiapkan program yang membutuhkan lebih banyak dana, serta berkomunikasi dengan donor dan pemerintah yang memberikan bantuan.

⁷⁵ UGM, “Tingginya Angka Putus Sekolah Di Indonesia | CNN Indonesia – Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan,” *Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*, 2017.

⁷⁶ Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik,” 2017.

Dengan dukungan finansial dari Kementerian Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) serta UNICEF menjalankan Inisiatif Pendidikan Terpencil dan Pedesaan di Provinsi Papua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi di sekolah dasar di wilayah terpencil dan pedesaan Provinsi Papua.⁷⁷

2.2.3.2 UNICEF berkontribusi pada perlindungan anak di Indonesia

Yang paling penting adalah kesejahteraan anak dan perlindungan mereka. Pada dasarnya anak-anak merupakan aset besar terhadap kelanjutan hidup bangsa. Anak-anak juga merupakan pion yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk tetap menjaga kesejahteraan dan keselamatan hidup setiap anak. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki populasi anak terbesar dengan berbagai tantangan dan masalah sosial dan kurangnya kesejahteraan anak yang perlu diperhatikan.

Anak-anak Indonesia mengalami hidup yang tidak layak. Lebih dari setengah anak dilahirkan dari keluarga yang tidak memiliki uang, yang menyebabkan sejumlah masalah. Di Indonesia, banyaknya kasus perdagangan dan eksploitasi anak merupakan masalah terbesar yang kita hadapi. Kita sering melihat Anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja buruh, pengamen, pengemis, pekerja seks, bahkan korban perdagangan manusia,

⁷⁷ Putri Junicia Gia et al., "PERAN UNITED NATION INTERNATIONAL CHILDREN ' S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DI BIDANG," 2023.

anak-anak sering kali mengalami eksploitasi dan perlakuan tidak layak, termasuk kekerasan. Hak-hak mereka untuk dilindungi juga sering terancam..⁷⁸

Pengeksploitasi dan perdagangan anak sering kali ditemukan korbannya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan kebanyakan dari rendahnya kehidupan ekonomi mereka. Ada banyak kasus eksploitasi anak dan diperjualbelikan untuk tujuan seksual dalam berbagai kasus pengkesploitasian dan perdagangan anak.⁷⁹ Dalam menangani perdagangan anak atau *Child Trafficking* di Indonesia, UNICEF membuat program NPAs (*National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking*). Pengimplementasian *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking* (NPAs) terwujud melalui pelaksanaan program yang relevan untuk memerangi perdagangan anak di Indonesia. UNICEF telah menangani kasus *child trafficking* melalui program NPAs dan telah memaksa pemerintah Indonesia untuk mengadopsi UU perlindungan anak, tetapi kasus *child trafficking* terus meningkat di Indonesia, dan UNICEF tidak dapat menangani kasus *child trafficking* secara efektif.⁸⁰

Eksistensi UNICEF dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan

⁷⁸ Nabila Thifallya Regina et al., “PERAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA ROLE OF UNICEF IN CHILDREN ’ S PROTECTION IN INDONESIA” (2023): 117–124.

⁷⁹ Mudji and Caharamayang, “Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia.”

⁸⁰ Nori Oktadewi, “Peranan Unicef Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia,” *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018).

dan berkelanjutan. Program yang dilaksanakan tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak melalui berbagai inisiatif yang inklusif.

